

# SKRIPSI

**BUDI SANTOSO**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI DALAM  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 JUNCTO  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 DIKAITKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**



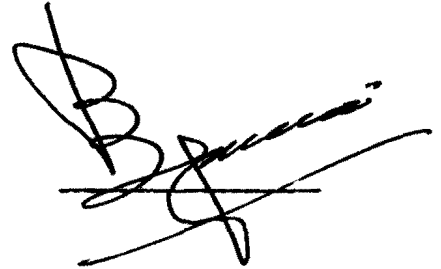
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

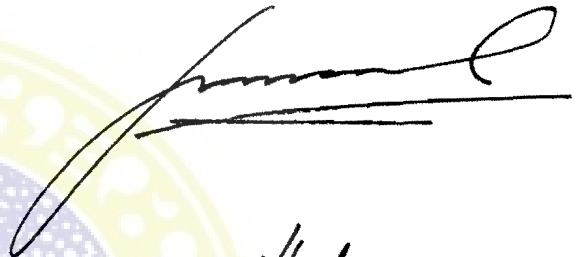
**Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 1 Februari 2000**

**Panitia Penguji Skripsi :**

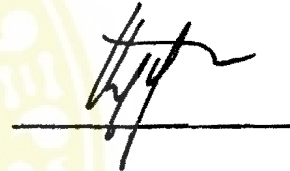
**Ketua : H.M. Kobiran, SH., MS.**



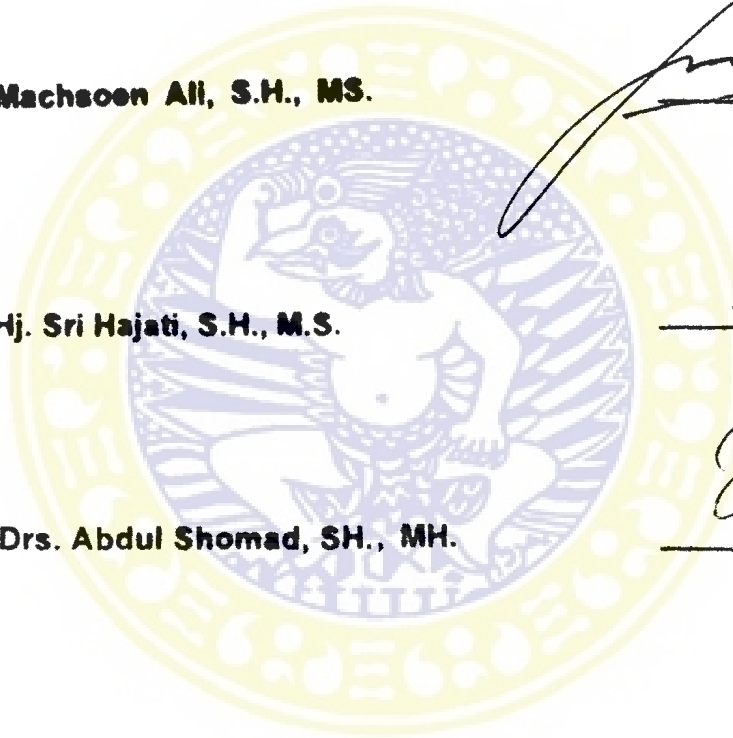
**Anggota : Machsoen Ali, S.H., MS.**



**Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.**



**Drs. Abdul Shomad, SH., MH.**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI DALAM  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 JUNCTO  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 DIKAITKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

  
**Machsoen Ali, SH, MS**

**NIP : 130355366**

  
**Budi Santoso**

**NIM : 039313668**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

## BAB V

### KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 yang dikaitkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, untuk mencegah poligami dan kebebasan seks bagi masyarakat dan khususnya Pegawai Negeri Sipil masih diragukan dalam prakteknya. Karena aspek implikasi peraturan pemerintah dan undang – undang tersebut adalah untuk mempersulit bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Melaksanakan perkawinan poligami. Dengan melihat syarat-syarat yang diterapkan dalam peraturan dan perundang-undangan tersebut. Sehingga banyak terjadi penyelewengan pada diri Pegawai Negeri Sipil untuk berpoligami yaitu dengan cara melakukan poligami secara ilegal, seperti melakukan kawin dibawah tangan, mempunyai istri simpanan, affair cinta atau kawin mut'ah. ini semua adalah kebebasan seks tanpa aturan yang resmi, jika hal ini terjadi maka Pegawai Negeri Sipil kehilangan martabat dan kewibawaan dalam masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemberitahuan dan kejelasan dalam peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tersebut. Sehingga Pegawai Negeri Sipil tidak keberatan dalam praktik poligami yang resmi. Dan lebih terhormat bagi Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami secara terbuka dan resmi dari pada secara ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abu, *Hikmah dan Keutamaan Poligami*, Solo : Pustaka Amanah, 1998.
- Arpan, Muhammad. *Beberapa Persoalan Poligami*, Jakarta : Liberti, 1986.
- Anwar, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Al - Ma'arif, 1981.
- Bibit, Suprpto, *Lika-Liku Poligami*, Jakarta : Gema Insani Press, 1992.
- CS, Jamilah, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam*, Terjemahan Oleh Muhammad Husen, Jakarta : Raja Grafindo Persada : 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992.
- Haiziri, Prof, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974* Jakarta, :Timnas, 1975
- \_\_\_\_\_, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta : Timtanas, 1974.
- Tatangpangsara, Humaidi, *Hakikat Poligami Dalam Islam*, Surabaya : Usaha Nasional, , tanpa tahun.
- Nasution, Khairudin, *Poligami Dan Riba (Studi atas Pemelkiran Muhammad Abduh)*, Jakarta : Lentera , 1998.
- Jahrani, Musfer Husen, *Poligami Dalam Berbagai Persepsi*. Terjemahan Oleh Muhammad Sutan Ritonga, Jakarta : Gema Insani Press, 1998.
- Khusuma Atmaja, Muhtar, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional* Lembaga Peneliti Hukum dan Krimonologi FH UNPAD, 1976.

Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang No 1 tahun 1974 khusus bagi Pegawai Negeri Sipil seperti dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian No 8 tahun 1974 dan pegawai-pegawai lainnya seperti dijelaskan dalam pasal 1 dalam UU No 8 tahun 1974.

Hanya sayang dari kesekian ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 ini terdapat hal yang bertentangan dengan Undang-Undang No 8 tahun 1974 ( antara lain dalam hal larangan poligami) dan tidak mempunyai efektifitas yang memadai dilapangan. Bertolak dari asas *Lex Superior Derogat Lege Inferior* maka ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak memiliki daya laku. Untuk itu perlu adanya suatu gagasan baru tentang bagaimana undang-undang yang berkaitan dengan masalah perkawinan ini tidak saling bertentangan, tetapi mempunyai kekuatan hukum yang tidak berlaku surut terhadap prinsip keadilan masyarakat secara umum dan khususnya Pegawai Negeri Sipil.

- Muttahari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Solo : Pustaka Amanah, 1993.
- Martokusno, Sudikno, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktek*, Yogyakarta : Leberti, , 1981.
- Nasution, Elhainudin, *Poligami dan Riba, (studi Atas Pemikiran Muhammad Abdulh)*, Jakarta : Lentera, 1998.
- Raharjo, Sucipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, , 1980.
- \_\_\_\_\_, *Sosial Enjenering, Usaha Mengatur Masyarakat Secara Statistik*, Harian Kompas edisi 25 Oktober 1976 dikutip dalam Buku *Beberapa Persoalan Poligami* oleh Arpan, Jakarta : Leberti, 1986.
- Sauhardi, Sigit, *Sekitar Teori Manajemen Di Indonesia*, Pidato Distalis ke XXII UPN Veteran, Yogyakarta 15 Desember 1980.
- Soekamto, Sarjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta : Bahrata Karya Aksara, 1997.
- Syabiq, Syayid *Fiqh Sunnah*, Terjemah oleh Muhammad Thalib, Bandung : Al Ma'arif, VI, 1994.
- Shiba'I, Mustafa, *Wanita Antara Hukum dan Jaman*, terjemah oleh Abdurrahman Lc, Bandung, : Al Ma'arif, 1987.
- Sabili, Edisi 22, 19 Mei 1999, Jakarta : Bina Media sabili,*



## **Peraturan Dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1  
Tahun 1974 Tentang perkawinan

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian  
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian  
Pegawai Negeri sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia No 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok  
Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri  
Sipil

Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri  
Sipil.

Surat Edaran Kepala BAKN No 08/SE/1981 Tentang Tindakan Administrasi dan  
Hukum Displin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki/ Menggunakan  
Izasah Palsu/Aspal